



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH**

DAN

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2020

**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN**

**KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana ditegaskan dalam Undang – Undang RI 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 69 ayat (1) serta menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Nomor:120.04/6931/OTDA Tanggal 18 Desember 2020 Hal Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2020, bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD). Kepala Daerah mempunyai kewajiban memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD serta menginformasikan LKPJ kepada Masyarakat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dalam rangka memenuhi maksud ketentuan diatas, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cirebon telah menyusun bahan LPPD/LKPJ Kabupaten Cirebon Tahun 2020. Laporan ini sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan Urusan Wajib Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Urusan Wajib Bidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cirebon, sehingga kedepan diharapkan akan terwujud peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah secara lebih efektif dan efisien.

Sumber, Februari 2021

KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN



H. SUKMA NUGRAHA SH., MM
NIP. 19590215 198503 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	viii
A. PENDAHULUAN	1
1. Gambaran Umum Kabupaten Cirebon.....	1
2. Visi dan Misi Kabupaten Cirebon	2
3. Kebijakan Umum dan Pengelolaan Keuangan.....	4
B. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	5
C. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN	5
1. Tugas Pembantuan yang Diterima.....	5
2. Permasalahan dan Solusi	7
3. Saran dan Tindak Lanjut.....	7
4. Hal lain yang perlu untuk dilaporkan	7
D. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	7
1. Urusan yang Melekat pada SKPD (Non Urusan)	10
a. Pelaksanaan Program dan Kegiatan	10
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	11
a). Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11
b). Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan.....	11

c).	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	12
d).	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12
e).	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	12
f).	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	12
g).	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13
h).	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	13
i).	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	13
j).	Kegiatan Penataan Arsip	13
2)	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	13
a).	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	14
b).	Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung kantor	14
c).	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	14
d).	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	14
e).	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	14
3)	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	15
a).	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15

b).	Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	15
c).	Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	15
d).	Kegiatan Monitoring ,Evaluasi dan pelaporan	15
4)	Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral.....	16
a).	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral	16
b).	Kegiatan Penyusunan Dokumen RPIJM	16
b.	Permasalahan dan Solusi.....	16
c.	Hal lain yang perlu untuk dilaporkan	16
2.	Urusan Wajib Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	17
a.	Pelaksanaan Program dan Kegiatan	17
1)	Program Pengembangan Perumahan	17
2)	Program Lingkungan Sehat Perumahan dan Permukiman ...	19
3)	Program Perencanaan Pengembangan Perumahan	20
4)	Program Penataan Lingkungan Permukiman	21
b.	Permasalahan dan Solusi.....	22
c.	Hal lain yang perlu untuk dilaporkan	23
3.	Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ...	23
a.	Pelaksanaan Program dan Kegiatan	23
1)	Program Perencanaan, Pembangunan, Pembinaan Bangunan dan Gedung.....	24

2) Program Perencanaan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum	25
3) Program Perencanaan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah Domestik.....	27
b. Permasalahan dan Solusi.....	28
c. Hal lain yang perlu untuk dilaporkan	29
4. Urusan Wajib Bidang Pertanahan	29
a. Pelaksanaan Program dan Kegiatan	29
1) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	30
2) Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan.....	31
b. Permasalahan dan Solusi.....	31
c. Hal lain yang perlu untuk dilaporkan	31
5. Prestasi-prestasi	31
E. PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	32
URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	32
1. Jenis Pelayanan Dasar	32
2. Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal ...	32
3. Alokasi Anggaran Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	32
4. Dukungan Personil Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.....	33
5. Permasalahan dan Solusi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.....	33

URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN ...	34
1. Jenis Pelayanan Dasar	34
2. Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal ...	34
3. Alokasi Anggaran Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	35
4. Dukungan Personil Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	35
5. Permasalahan dan Solusi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.....	35
F. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ TAHUN 2019	36
PENUTUP	40

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kondisi Infrastruktur di Kabupaten Cirebon.....	1
Tabel 2. Jumlah Bangunan Rumah Tinggal Menurut Kecamatan	1
Tabel 3. Target dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2019 dan 2020	3
Tabel 4. Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung	4
Tabel 5. Pengelolaan Anggaran APBN dan APBD Provinsi	4
Tabel 6. Daftar Pelaksanaan Tugas Pembantuan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.....	6
Tabel 7. Belanja Urusan, Program dan Kegiatan	8
Tabel 8. Program dan Kegiatan Non Urusan	10
Tabel 9. Program dan Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun Anggaran 2020	17
Tabel 10. Program dan Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun Anggaran 2020	23
Tabel 11. Program dan Kegiatan Urusan Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun Anggaran 2020.....	29
Tabel 12. Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	32
Tabel 13. Anggaran untuk Mencapai SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	33
Tabel 14. Dukungan Personil untuk Mencapai SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	33

Tabel 15. Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	34
Tabel 16. Anggaran untuk Mencapai SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	35
Tabel 17. Dukungan Personil untuk Mencapai SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	35
Tabel 18. Daftar Nama Desa Penerima Program Pamsimas Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2020	37
Tabel 19. Daftar Nama Desa Penerima Bantuan Program BSPS Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2020	38
Tabel 20. Daftar Nama Desa Penerima Bantuan Program Perbaikan Rutilahu Sumber Dana APBD I Tahun Anggaran 2020	39

A. PENDAHULUAN

1. Gambaran Umum Kabupaten Cirebon

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menangani Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Urusan Pertanahan di Kabupaten Cirebon. Tabel 1 dan Tabel 2 merupakan gambaran kondisi infrastruktur di Kabupaten Cirebon.

Tabel 1. Kondisi Infrastruktur di Kabupaten Cirebon

Uraian	Jumlah
Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	501.151 RT
Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi	576.048 RT
Panjang Saluran Drainase	0
Luas Wilayah Kawasan Kumuh	78,78 Ha
Luas Permukiman Kumuh	4002,34 Ha
Jumlah Rumah Layak Huni	491.847 Rumah
Jumlah Konflik Pertanahan Milik Negara	0
Jumlah Konflik Pertanahan yang telah ditangani	1
Luasan Tanah yang telah bersertifikat di Kabupaten Cirebon	329.709.529 m ²

Tabel 2. Jumlah Bangunan Rumah Tinggal Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Bangunan Rumah
1	Arjawinangun	14,541
2	Astanajapura	19,976
3	Babakan	24,001
4	Beber	8,573
5	Ciledug	31,687
6	Ciwaringin	9,367
7	Depok	5,323
8	Dukupuntang	16,012
9	Gebang	13,187
10	Gegesik	15,830
11	Gempol	22,471
12	Greged	12,146
13	Gunungjati	12,748
14	Jamblang	8,077
15	Kaliwedi	9,529
16	Kapetakan	709
17	Karangsembung	7,782
18	Karangwareng	4,987
19	Kedawung	24,461
20	Klangenan	10,667
21	Lemahabang	12,289
22	Losari	7,670
23	Mundu	17,622
24	Pabedilan	8,542

No	Kecamatan	Jumlah Bangunan Rumah
25	Pabuaran	6,491
26	Palimanan	7,716
27	Pangenan	9,889
28	Panguragan	10,619
29	Pasaleman	5,651
30	Plered	17,662
31	Plumbon	6,547
32	Sedong	9,289
33	Sumber	36,811
34	Suranenggala	14,140
35	Susukan	14,653
36	Susukan lebak	8,283
37	Talun	16,145
38	Tengah tani	561
39	Waled	12,209
40	Weru	10,710
	JUMLAH	505,573

2. Visi dan Misi Kabupaten Cirebon

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada Tahun Anggaran 2020, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan memiliki target kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun Anggaran 2020. Tabel 3 merupakan capaian kinerja dalam RKPD Tahun 2020 yang merupakan tanggung jawab dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Tabel 3. Target dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2019 dan 2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2019	CAPAIAN 2019	TARGET 2020	CAPAIAN 2020	KET
	ASPEK DAYA SAING DAERAH						
	FOKUS FASILITAS WILAYAH/ INFRASTRUKTUR						
6	RT yang menggunakan air bersih	%	69,41	67,87	70,19	65,07	
	ASPEK PELAYANAN UMUM						
	LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR						
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN						
	Cakupan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau bagi masyarakat	%	96,64	97,02	97,71	63,86	Penambahan 1330 Rutilahu dari target 3000 Rutilahu
	Persentase pembangunan Bangunan dan Gedung Negara yang sesuai dengan NSPK	%	0	1,60	2	9	2019=8 SLF 2020=45 SLF Jumlah Bangunan seharusnya SLF=500
	Persentase SR (Sambungan Rumah) Air Minum	%	69,41	67,87	70,19	65,07	Penambahan 1435 SR dari target 11300 SR
	Persentase SR (Sambungan Rumah) Air Limbah	%	80,81	78,24	80,89	74,86	Penambahan 1460 SR dari target 7500SR
	Persentase Permukiman Kumuh	%	3,74	0	2,99	3,73	Berkurang 8,507 Ha dari target 1000,585 Ha
	Cakupan Lingkungan Permukiman yang tertata	%	87,36	0	89,89	87,39	Penambahan 8,507 Ha
	Persentase kepemilikan tanah pemerintah daerah yang tertata dengan baik	%	37,89	0	44,12	0	
	Persentase penyelesaian konflik pertanahan di Kabupaten Cirebon	%	100	0	100	33,33	1 konflik dari 3 pengaduan
	LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR						
4	PERTANAHAN						
	Penyelesaian izin lokasi	%	100	0	100	100	977 izin lokasi
	Tingkat pencapaian pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	lokasi	4	4	8	8	8 Penetapan Lokasi
	Persentase luas lahan bersertifikat	%	37,89	0	44,12	31,07	Luas lahan bersertifikat=329.709.529 m ² Luas lahan yang seharusnya bersertifikat=1.061.079.422 m ²
	Penyelesaian kasus Tanah Negara	%	100	40	100	0	

3. Kebijakan Umum dan Pengelolaan Keuangan

Pada Tahun Anggaran 2020, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mengelola anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon sejumlah Rp. 42.168.639.300,00 dengan realisasi sejumlah Rp. 39.730.670.008,00 atau 94,22%. Sedangkan sisa anggaran yang tidak diserap sejumlah Rp. 2.437.969.292,00. Tabel 4 menjelaskan rincian pengelolaan anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon pada Tahun Anggaran 2020.

Tabel 4. Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun Anggaran 2020

KODE REK.	URAIAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	PERSEN (%)
4.	PENDAPATAN DAERAH	0	0	0	0
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0	0	0	0
4.1.4.	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	0	0	0	0
4.1.4.0	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	0	0	0	0
4.1.4.0	Penjualan Bahan-bahan	0	0	0	0
1.10	Bekas Bangunan	0	0	0	0
	Dst	0	0	0	0
JUMLAH PENDAPATAN					
5.	BELANJA	42.168.639.300	39.730.670.008	2.437.969.292	94,22
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.208.572.000	7.173.365.692	1.035.206.308	87,39
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	8.208.572.000	7.173.365.692	1.035.206.308	87,39
5.2.	BELANJA LANGSUNG	33.960.067.300	32.557.304.316	1.402.762.984	95,87
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.508.434.000	1.394.741.000	1.545.870.000	92,46
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.670.447.300	9.389.342.316	42.109.984.102	95,82
5.2.3.	BELANJA MODAL	1.781.186.000	1.773.221.000	92.274.772.793	99,55
JUMLAH BELANJA		42.168.639.300	39.730.670.008	2.437.969.292	94,22
SURPLUS / (DEFISIT)					

Selain mengelola Anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan juga memperoleh anggaran yang berasal dari APBN atau APBD Provinsi Jawa Barat dengan rincian pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Pengelolaan Anggaran APBN dan APBD Provinsi Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun Anggaran 2020

No	Sumber Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	%	Ket.
1	APBN	8.100.500.000	7.720.575.289	379.924.711	95,31	
1.1	Kementerian xxx					
2	APBD Prov Jabar	10.755.000.000	10.713.719.000	41.281.000	99,62	
2.1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	23.313.139.300	21.296.375.719	2.016.763.581	91,35	

B. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Untuk capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan, selanjutnya dapat dilihat pada Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana tercantum dalam lampiran laporan ini.

C. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan merupakan implementasi dari sistem dan prosedur penugasan pemerintah kepada daerah, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada pemberi penugasan.

Pemberian anggaran Tugas Pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan umum. Adapun tujuan pemberian Tugas Pembantuan tersebut adalah untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

1. Tugas Pembantuan yang Diterima

Anggaran Tugas Pembantuan yang diterima Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada Tahun Anggaran 2020 bersumber dari 4 (empat) Kementerian dan 2 (dua) Dinas Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Rincian tugas pembantuan yang diterima Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat dilihat pada Tabel 6 berikut:

- a. APBN Kementerian: BSPS/Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
- b. APBD I/ Banprov : Perbaikan Rutilahu Banprov

Tabel 6. Daftar Pelaksanaan Tugas Pembantuan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun Anggaran 2020

No	Bidang Urusan	Instansi Pemberi Tugas Pembantuan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Alokasi Anggaran	%	Realisasi (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Perumahan Rakyat	Kementerian/ LPNK PUPR	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	Program Pengembangan Perumahan Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi pembangunan Perumahan masyarakat berpenghasilan rendah Keluaran (<i>Output</i>) Rumah Layak huni Rincian Kegiatan membuat usulan, memfasilitasi Pelaksanaan, melakukan pendataan	16.975.000.000		16.975.000.000	1	100%	100
2	Perumahan Rakyat	Dinas Perkim Prov. Jabar	Peraturan Gubernur No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Pergub Jabar No.34 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Prov Jabar	Program Pengembangan Perumahan, Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi pembangunan Perumahan masyarakat berpenghasilan rendah Keluaran (<i>Output</i>) Rumah Layak huni Rincian Kegiatan membuat usulan, memfasilitasi Pelaksanaan, melakukan pendataan	6.300.000.000		6.300.000.000		100%	100
3	Pekerjaan Umum	Kementerian Keuangan		Program Perencanaan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah Domestik, Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah Domestik						
4	Pekerjaan Umum	Kementerian Keuangan		Program Perencanaan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah Domestik, Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah Domestik						

2. Permasalahan dan Solusi

Dalam melaksanakan Tugas Pembantuan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menghadapi beberapa masalah sebagai berikut:

- a) Minimnya Swadaya Masyarakat
- b) Minimnya pemahaman masyarakat mengenai rumah layak huni
- c) Budaya masyarakat perihal hari baik

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi sebagaimana tersebut diatas, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan telah melakukan solusi-solusi yaitu pelaksanaan sosialisasi dalam penyelenggaraan tugas pembantuan.

3. Saran dan Tindak Lanjut

Untuk pelaksanaan Tugas Pembantuan kami menyampaikan saran dan tindak lanjut sebagai berikut:

- a) Penambahan nominal besaran bantuan per CPCL
- b) Pencairan tepat waktu

4. Hal lain yang perlu untuk dilaporkan

Dalam melaksanakan Tugas Pembantuan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut peningkatan pemahaman masyarakat mengenai rumah layak huni sangat penting agar mendukung pelaksanaan kegiatan ini.

D. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan melaksanakan 4 (empat) urusan pemerintahan yaitu urusan yang melekat pada SKPD (non urusan), Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Urusan Pertanahan.

Pelaksanaan urusan yang melekat pada SKPD (non urusan) pada Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan melalui 4 (empat) Program dan 21 (dua puluh satu) Kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp. 2.456.669.800,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.990.514.537,00 sisa sebesar Rp. 466.155.236,00 atau tercapai sebesar 81,02%.

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan melalui 4 (empat) Program dan 11 (sebelas) Kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp. 15.530.131.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 15.198.038.700,00 sisa sebesar Rp. 332.092.300,00 atau tercapai sebesar 97,86%.

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan melalui 3 (tiga) Program dan 13 (tiga belas) Kegiatan, dengan

anggaran sebesar Rp. 15.648.839.800,00 dan terealisasi sebesar Rp. 15.138.322.919,00 sisa sebesar Rp. 510.516.881,00 atau tercapai sebesar 96,74%.

Urusan Pertanahan pada Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan melalui 2(dua) Program dan 3 (tiga) Kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp. 324.426.700,00 dan terealisasi sebesar Rp. 230.428.160,00 sisa sebesar Rp. 93.998.540,00 atau tercapai sebesar 71,03 %.

Urusan pemerintahan yang dijalankan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dijelaskan pada Tabel 7.

**Tabel 7. Belanja Urusan, Program dan Kegiatan
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Tahun Anggaran 2020**

NO	URAIAN	ALOKASI	REALISASI	SISA	(%)
	BELANJA DPKPP	42.168.639.300	39.727.570.008	2.441.069.292	94,21
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.208.572.000	7.173.365.692	1.035.206.308	87,39
	BELANJA PEGAWAI	8.208.572.000	7.173.365.692	1.035.206.308	87,39
	Gaji dan Tunjangan	4.140.144.000	3.596.564.692	543.579.308	86,87
	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	2.991.368.000	2.618.441.660	372.926.340	87,53
	Tunjangan Keluarga (Istri/Suami + Anak)	335.323.000	290.491.041	44.831.959	86,63
	Tunjangan Struktural / Jabatan	192.631.000	185.760.000	6.871.000	96,43
	Tunjangan Umum	109.134.000	96.565.000	12.569.000	88,48
	Tunjangan Beras	202.160.000	149.764.560	52.395.440	74,08
	Tunjangan Khusus / Tunjangan PPh	6.406.000	4.747.518	1.658.482	74,11
	Pembulatan Gaji	46.000	35.020	10.980	76,13
	Iuran Jaminan Kesehatan	266.242.000	229.179.152	37.062.848	86,08
	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	9.209.000	5.395.172	3.813.828	58,59
	Jaminan Kematian (JKM)	27.625.000	16.185.569	11.439.431	58,59
	Tambahan Penghasilan PNS	4.068.428.000	3.576.801.000	491.627.000	87,92
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja	4.068.428.000	3.576.801.000	491.627.000	87,92
	BELANJA LANGSUNG	33.960.067.300	32.554.204.316	1.399.662.984	95,86
I	NON URUSAN	2.456.669.800	1.990.514.537	466.155.263	81,02
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.284.474.200	849.298.647	435.175.553	66,12
1	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	406.000.000	213.814.449	192.185.551	52,66
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	25.000.000	12.520.000	12.480.000	50,08
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	264.962.900	264.911.900	51.000	99,98
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.002.100	40.001.700	400	100,00
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	14.000.000	13.998.400	1.600	99,99
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	74.400.000	45.700.000	28.700.000	61,42
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.680.000	6.400.000	1.280.000	83,33
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	19.540.000	3.800.000	15.740.000	19,45
9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	293.800.000	109.977.458	183.822.542	37,43
10	Penataan Arsip	139.089.200	138.174.740	914.460	99,34
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	853.957.000	828.520.210	25.436.790	97,02
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	106.000.000	105.500.000	500.000	99,53
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	136.686.000	136.186.000	500.000	99,63
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	343.533.000	340.274.210	3.258.790	99,05
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	198.238.000	187.610.000	10.628.000	94,64

NO	URAIAN	ALOKASI	REALISASI	SISA	(%)
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	69.500.000	58.950.000	10.550.000	84,82
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	117.836.600	116.405.020	1.431.580	98,79
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	46.799.800	46.715.220	84.580	99,82
2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	14.690.000	14.103.000	587.000	96,00
3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	15.399.800	15.399.800	-	100,00
4	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	40.947.000	40.187.000	760.000	98,14
4	Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral	200.402.000	196.290.660	4.111.340	97,95
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral	146.252.000	142.846.660	3.405.340	97,67
2	Penyusunan Dokumen RPIJM	54.150.000	53.444.000	706.000	98,70
II	URUSAN PEKERJAAN UMUM	15.648.839.800	15.138.322.919	510.516.881	96,74
1	Program Perencanaan, Pembangunan, Pembinaan Bangunan dan Gedung	1.983.017.100	1.819.708.660	163.308.440	91,76
1	Pembangunan/Peningkatan dan Rehabilitasi Bangunan dan Gedung	215.852.400	196.159.010	19.693.390	90,88
2	Kajian Teknis Bangunan Gedung pada Perumahan	431.987.500	389.574.500	42.413.000	90,18
3	Pengendalian dan Pengawasan Bangunan Gedung di Perumahan	137.701.400	117.030.580	20.670.820	84,99
4	Rekayasa dan Rancang Bangun Bangunan dan Gedung	971.198.200	903.306.380	67.891.820	93,01
5	Penyediaan Data Informasi Kepemilikan Bangunan dan Gedung	226.277.600	213.638.190	12.639.410	94,41
2	Perencanaan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum	8.488.940.200	8.154.322.659	334.617.541	96,06
1	Rekayasa dan Rancang Bangun Sarana dan Prasarana Air Minum	595.627.800	552.298.320	43.329.480	92,73
2	Penyediaan Data Informasi Sarana dan Prasarana Air Minum	21.932.100	20.796.690	1.135.410	94,82
3	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi Masyarakat	3.775.158.500	3.498.676.869	276.481.631	92,68
4	Penyediaan Sistem Distribusi Air Minum	4.096.221.800	4.082.550.780	13.671.020	99,67
3	Program Perencanaan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah Domestik	5.176.882.500	5.164.291.600	12.590.900	99,76
1	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah Domestik	4.794.448.500	4.793.958.460	490.040	99,99
2	Penyediaan Air Limbah Domestik Berbasis Masyarakat	235.710.000	225.669.960	10.040.040	95,74
3	Rekayasa dan Rancang Bangun Air Limbah Domestik	72.982.100	72.083.690	898.410	98,77
4	Penyediaan Data Informasi Sarana dan Prasarana Air Limbah Domestik	73.741.900	72.579.490	1.162.410	98,42
III	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT	15.530.131.000	15.194.938.700	328.992.300	97,84
1	Program Pengembangan Perumahan	524.369.700	396.306.020	128.063.680	75,58
1	Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah	395.179.900	297.579.140	97.600.760	75,30
2	Pengendalian Dokumen Rencana Teknis Perumahan	98.999.800	94.189.380	4.810.420	95,14
3	Fasilitasi Pembangunan Rumah Khusus dan Rumah Susun	30.190.000	4.537.500	25.652.500	15,03
2	Program Lingkungan Sehat Perumahan dan Permukiman	13.298.297.500	13.133.493.700	164.803.800	98,74
1	Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk Perdesaan dan Perkotaan	11.886.492.700	11.775.582.660	110.910.040	99,07
2	Verifikasi dan Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan	1.156.463.900	1.114.721.960	44.841.940	96,39
3	Rekayasa dan Rancang Bangun Sarana dan Prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman	26.677.800	23.634.390	3.043.410	88,59
4	Penyediaan Data informasi	228.663.100	219.554.690	9.108.410	96,02

NO	URAIAN	ALOKASI	REALISASI	SISA	(%)
	Infrastruktur di Kawasan Permukiman				
3	Program Perencanaan Pengembangan Perumahan (Perumahan Rakyat)	450.709.800	436.067.980	14.641.820	96,75
1	Rekayasa dan Rancang Bangun Pengembangan Perumahan	224.522.000	220.033.590	4.488.410	98,00
2	Penyediaan Data Informasi Perumahan	226.187.800	216.034.390	10.153.410	95,51
4	Program Penataan Lingkungan Permukiman	1.256.754.000	1.235.271.000	21.483.000	98,29
1	Pengendalian Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	1.199.500.000	1.178.017.000	21.483.000	98,21
2	Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW)	57.254.000	57.254.000	-	100,00
IV	URUSAN PERUMAHAN PERTANAHAN	324.426.700	230.428.160	93.998.540	71,03
1	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	274.426.700	212.648.160	61.778.540	77,49
1	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	199.426.700	138.697.380	60.729.320	69,55
2	Inventarisasi dan Penatagunaan Tanah	75.000.000	73.950.780	1.049.220	98,60
2	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	50.000.000	17.780.000	32.220.000	35,56
1	Fasilitasi Penyelesaian Konflik- konflik Pertanahan	50.000.000	17.780.000	32.220.000	35,56
	JUMLAH	42.168.639.300	39.730.670.008	2.437.969.292	94,22

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada Tahun Anggaran 2020 menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagai berikut:

1. Urusan yang Melekat pada SKPD (Non Urusan)
 - a. Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pelaksanaan urusan ini dalam rangka menunjang fungsi lini staf yang ada di SKPD khususnya pada Sekretariat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Dalam rangka melaksanakan urusan ini, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan melaksanakan 4 (empat) program dan 21 (dua puluh satu) kegiatan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

**Tabel 8. Program dan Kegiatan Non Urusan
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Tahun Anggaran 2020**

No	Uraian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Non Urusan		2.456.669.800	1.990.514.537	81,02
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.284.474.200	849.298.647	66,12
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	406.000.000	213.814.449	52,66
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	25.000.000	12.520.000	50,08
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	264.962.900	264.911.900	99,98
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.002.100	40.001.700	100,00
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	14.000.000	13.998.400	99,99
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	74.400.000	45.700.000	61,42
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.680.000	6.400.000	83,33
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	19.540.000	3.800.000	19,45
9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	293.800.000	109.977.458	37,43
10	Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Kantor	-	-	

No	Uraian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
11	Penataan Arsip	139.089.200	138.174.740	99,34
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	853.957.000	828.520.210	97,02
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	106.000.000	105.500.000	99,53
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	136.686.000	136.186.000	99,63
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	343.533.000	340.274.210	99,05
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	198.238.000	187.610.000	94,64
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	69.500.000	58.950.000	84,82
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	117.836.600	116.405.020	98,79
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	46.799.800	46.715.220	99,82
2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	14.690.000	14.103.000	96,00
3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	15.399.800	15.399.800	100,00
4	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	40.947.000	40.187.000	98,14
4	Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral	200.402.000	196.290.660	97,95
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral	146.252.000	142.846.660	97,67
2	Penyusunan Dokumen RPIJM	54.150.000	53.444.000	98,70

Rincian pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan ialah sebagai berikut:

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Anggaran pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dilaksanakan Bidang Sekretariat sebesar Rp. 1.284.474.200,00 dan terealisasi sebesar Rp. 849.298.647,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp. 466.155.263,00 atau tercapai sebesar 81,02%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

a). Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Anggaran pada Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik sebesar Rp. 406.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 213.814.449,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp. 192.185.551,00 atau tercapai sebesar 52,66%.

Output kegiatan ini adalah terbayarnya rekening telepon, listrik dan air. *Outcome* kegiatan ini adalah mewujudkan pemenuhan pelayanan administrasi.

b). Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Alokasi anggaran sebesar Rp. 25.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 12.520.000,00 sisa sebesar Rp. 12.480.000,00 atau tercapai sebesar 50,08%.

Output kegiatan adalah terbayarnya pajak kendaraan dinas/operasional 42 unit kendaraan roda 2.

Outcome kegiatan ini adalah mewujudkan pemenuhan pelayanan administrasi.

c). Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Alokasi anggaran sebesar Rp. 264.962.900,00 dan terealisasi sebesar Rp. 264.911.900,00 sisa sebesar Rp. 51.000,00 atau tercapai sebesar 99,98%.

Output kegiatan adalah tersedianya 35 jenis alat tulis kantor.

Outcome kegiatan ini adalah mewujudkan pemenuhan pelayanan administrasi.

d). Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Alokasi anggaran sebesar Rp. 40.002.100,00 dan terealisasi sebesar Rp. 40.001.700,00 sisa sebesar Rp. 400,00 atau tercapai sebesar 100%.

Output kegiatan adalah tersedianya 20 jenis barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan sebesar 82 rim.

Outcome kegiatan ini adalah mewujudkan pemenuhan pelayanan administrasi.

e). Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Alokasi anggaran sebesar Rp. 14.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 13.998.400,00 sisa sebesar Rp. 1.600,00 atau tercapai sebesar 99,99 %.

Output kegiatan adalah tersedianya 20 komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.

Outcome kegiatan ini adalah mewujudkan pemenuhan pelayanan administrasi.

f). Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan

Alokasi anggaran sebesar Rp. 74.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 45.700.000,00 sisa sebesar Rp. 28.700.000,00 atau tercapai sebesar 61,42%.

Output kegiatan adalah tersedianya surat kabar/koran 24 eksemplar dan penayangan 4 iklan.

Outcome kegiatan ini adalah mewujudkan pemenuhan pelayanan administrasi.

g). Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Alokasi anggaran sebesar Rp.15.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.680.000,00 sisa sebesar Rp. 1.280.000,00 atau tercapai sebesar 83,33%.

Output kegiatan adalah tersedianya bahan logistik kantor 100 kali dalam rangka pemenuhan pelayanan administrasi.

Outcome kegiatan ini adalah mewujudkan pemenuhan pelayanan administrasi.

h). Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Alokasi anggaran sebesar Rp.19.540.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.800.000,00 sisa sebesar Rp. 15.740.000,00 atau tercapai sebesar 19,45%. *Output* kegiatan adalah makan minum rapat selama 100 kali.

Outcome kegiatan ini adalah mewujudkan pemenuhan pelayanan administrasi.

i). Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Alokasi anggaran sebesar Rp. 293.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 109.977.458,00 sisa sebesar Rp. 183.822.542,00 atau tercapai sebesar 37,43%.

Output kegiatan adalah rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah.

Outcome kegiatan ini adalah mewujudkan pemenuhan pelayanan administrasi.

j). Kegiatan Penataan Arsip

Alokasi anggaran sebesar Rp. 139.089.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 138.174.740,00 sisa sebesar Rp. 914.460,00 atau tercapai sebesar 99,34%.

Output kegiatan adalah penataan file/dokumen dan arsip.

Outcome kegiatan ini adalah mewujudkan pemenuhan pelayanan administrasi.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Alokasi anggaran untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp. 853.957.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 828.520.210,00 sisa sebesar Rp. 25.436.790,00 atau tercapai sebesar 97,02%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a). Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Alokasi anggaran ini sebesar Rp. 106.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 105.500.000,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp. 500.000,00 atau tercapai sebesar 99,53 %.
- Output* kegiatan adalah tersedianya sarana dan prasarana perlengkapan kantor 100 jenis.
- Outcome* kegiatan ini adalah mewujudkan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur yang sesuai standar.
- b). Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung kantor
Alokasi anggaran sebesar Rp. 136.686.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 136.186.000,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp. 500.000,00 atau tercapai sebesar 99,63%.
- Output* kegiatan adalah tersedianya peralatan kantor yang memadai.
- Outcome* kegiatan ini adalah mewujudkan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur yang sesuai standar.
- c). Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Alokasi anggaran sebesar Rp. 343.533.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 340.274.210,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp. 3.258.790,00 atau tercapai sebesar 99,05%.
- Output* kegiatan ini adalah terpeliharanya 3 unit bangunan.
- Outcome* kegiatan ini adalah mewujudkan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur yang sesuai standar.
- d). Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Alokasi anggaran sebesar Rp. 198.238.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 187.610.000,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp. 10.628.000,00 atau tercapai sebesar 94,64%.
- Output* kegiatan adalah terpeliharanya 100 unit.
- Outcome* kegiatan ini adalah mewujudkan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur yang sesuai standar.
- e). Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Alokasi anggaran sebesar Rp. 69.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 58.950.000,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp. 10.550.000,00 atau tercapai sebesar 84,82%.

Output kegiatan adalah terpeliharanya 20 jenis peralatan gedung kantor. *Outcome* kegiatan ini adalah mewujudkan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur yang sesuai standar.

3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Alokasi anggaran untuk Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebesar Rp. 117.836.600,00 dan terealisasi sebesar Rp. 116.405.020,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp. 1.431.580,00 atau tercapai sebesar 98,79%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

a). Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 46.799.800,00 dan terealisasi sebesar Rp. 46.715.220,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp. 84.580,00 atau tercapai sebesar 99,82%.

Output kegiatan ini adalah dokumen LAKIP, LPPD/LKPJ, SPM, IKU, dan PERKIN.

Outcome kegiatan ini adalah mewujudkan pemenuhan capaian kinerja.

b). Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Alokasi anggaran sebesar Rp. 14.690.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 14.103.000,00 sisa sebesar Rp. 587.000,00 atau tercapai sebesar 96,00 %.

Output kegiatan adalah dokumen laporan keuangan semesteran (1 dokumen).

Outcome kegiatan ini adalah mewujudkan pemenuhan capaian kinerja.

c). Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Alokasi anggaran sebesar Rp. 15.399.800,00 dan terealisasi sebesar Rp. 15.399.800,00 sisa sebesar Rp. 0,00 atau tercapai sebesar 100%.

Output kegiatan adalah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD.

Outcome kegiatan ini adalah mewujudkan pemenuhan capaian kinerja.

d). Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan

Alokasi anggaran sebesar Rp. 40.947.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 40.187.000,00 sisa sebesar Rp. 760.000,00 atau tercapai sebesar 98,14%. *Output* kegiatan adalah dokumen hasil monitoring dan evaluasi

program dan kegiatan. *Outcome* kegiatan ini adalah mewujudkan pemenuhan capaian kinerja.

4) Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral

Alokasi anggaran untuk Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral sebesar Rp. 200.402.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 196.290.660,00 sisa sebesar Rp. 4.111.340,00 atau tercapai sebesar 97,95%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

a). Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral

Alokasi anggaran sebesar Rp. 146.252.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 142.846.000,00 sisa sebesar Rp. 3.405.340,00 atau tercapai sebesar 97,67%. *Output* kegiatan adalah dokumen RENJA dan RKA. *Outcome* kegiatan ini adalah penjabaran konsistensi program Renja ke dalam RKA.

b). Kegiatan Penyusunan Dokumen RPIJM

Alokasi anggaran sebesar Rp. 54.150.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 53.444.000,00 sisa sebesar Rp. 706.000,00 atau tercapai sebesar 98,70 %. *Output* kegiatan adalah dokumen *review* penyusunan dokumen RPIJM. *Outcome* kegiatan ini adalah penjabaran konsistensi program Renja ke dalam RKA.

b. Permasalahan dan Solusi

Dalam melaksanakan urusan yang melekat pada SKPD (Non Urusan), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menghadapi beberapa masalah sebagai berikut:

- a) Kurangnya Sumber Daya Manusia (Pegawai Negeri Sipil) dengan dasar keahlian tenaga Teknis
- b) Tidak adanya diklat dibidang teknis

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi sebagaimana tersebut diatas, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan telah melakukan solusi-solusi sebagai berikut:

- a) Fasilitas Diklat hanya berpusat pada BKPSDM sehingga Instansi terkait hanya mengusulkan jenjang Diklat yang akan diikuti
- b) Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil harus diusulkan untuk Pegawai yang mempunyai dasar kompetensi di bidang Teknis

c. Hal lain yang perlu untuk dilaporkan

Dalam melaksanakan urusan yang melekat di SKPD (Non Urusan), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan perlu menyampaikan

bahwa DPKPP perlu peningkatan kapasitas aparatur di Bidang Teknik dalam pelaksanaan program/kegiatan.

2. Urusan Wajib Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a. Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pelaksanaan urusan ini dalam rangka pelaksanaan urusan wajib pemerintahan yang merupakan tugas utama dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Dalam rangka melaksanakan urusan ini, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan melaksanakan 4 (empat) program dan 11 (sebelas) kegiatan sebagaimana tercantum dalam Tabel 9.

**Tabel 9. Program dan Kegiatan
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun Anggaran 2020**

No	Uraian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		15.530.131.000	15.201.638.700	97,88
Program Pengembangan Perumahan		524.369.700	396.806.020	75,67
1	Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah	395.179.900	298.079.140	75,43
2	Pengendalian Dokumen Rencana Teknis Perumahan	98.999.800	94.189.380	95,14
3	Fasilitasi Pembangunan Rumah Khusus dan Rumah Susun	30.190.000	4.537.500	15,03
Program Lingkungan Sehat Perumahan dan Permukiman		13.298.297.500	13.133.493.700	98,76
1	Rekayasa dan Rancang Bangun Sarana dan Prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman	26.677.800	23.634.390	88,59
2	Penyediaan Data informasi Infrastruktur di Kawasan Permukiman	228.663.100	219.554.690	96,02
3	Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk Perdesaan dan Perkotaan	11.886.492.700	11.775.582.660	99,07
4	Verifikasi dan Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan	1.156.463.900	1.114.721.960	96,39
Program Perencanaan Pengembangan Perumahan		450.709.800	436.067.980	96,75
1	Rekayasa dan Rancang Bangun Pengembangan Perumahan	224.522.000	220.033.590	98,00
2	Penyediaan Data Informasi Perumahan	226.187.800	216.034.390	95,51
Program Penataan Lingkungan Permukiman		1.256.754.000	1.235.271.000	98,29
1	Pengendalian Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	1.199.500.000	1.178.017.000	98,21
2	Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW)	57.254.000	57.254.000	100,00

Rincian pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan ialah sebagai berikut:

1) Program Pengembangan Perumahan

Alokasi anggaran untuk Program Pengembangan Perumahan sebesar Rp. 15,530,131,000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 15,198,038,700,00 sisa sebesar Rp. 332.092.300,00 atau tercapai sebesar 97,86%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Anggaran pada Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebesar Rp. 395.179.900,00 dan terealisasi sebesar Rp. 298.079.140,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp. 97.100.760,00 atau tercapai sebesar 75,43%. *Output* kegiatan ini adalah Biaya Operasional Pendukung (BOP) dan pendampingan Kegiatan Rutilahu yang bersumber dari dana Provinsi bantuan rutilahu untuk Kabupaten Cirebon sebesar 360 unit dengan besaran bantuan sebesar 17.500.000. Rutilahu yang bersumber dari dana BSPS bantuan rutilahu untuk Kabupaten Cirebon sebesar 970 unit dengan besaran, 1 Kegiatan Jasa konsultan Perencanaan. Total terbangunnya 1330 rumah layak huni dari target sebesar 2366 rumah atau mencapai 56,21%.

Outcome kegiatan ini adalah meningkatkan cakupan ketersediaan rumah layak huni. Realisasi capaian kinerja hanya sebesar 56,21% dikarenakan ada *refocusing* pandemi covid-19.

b. Kegiatan Pengendalian Dokumen Rencana Teknis Perumahan

Anggaran pada Kegiatan Pengendalian Dokumen Rencana Teknis Perumahan dengan sebesar Rp. 98.999.800,00 dan terealisasi sebesar Rp. 94.189.380,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp. 4.810.420,00 atau tercapai sebesar 95,14%.

Output kegiatan ini adalah 75 dokumen rencana teknis perumahan dari target sebesar 50 dokumen (150%).

Outcome kegiatan ini adalah meningkatkan cakupan ketersediaan rumah layak huni.

c. Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Rumah Khusus dan Rumah Susun

Anggaran pada Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Rumah Khusus dan Rumah Susun sebesar Rp. 30.190.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.537.500,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp. 25.652.500,00 atau tercapai sebesar 15,03%.

Output kegiatan ini adalah terfasilitasinya rumah khusus dan rumah susun sebesar 1 unit, tapi karena adanya *refocusing* pandemi covid-19 kegiatan ini tidak dilaksanakan.

Outcome kegiatan ini adalah meningkatkan cakupan ketersediaan rumah layak huni.

2) Program Lingkungan Sehat Perumahan dan Permukiman

Alokasi anggaran untuk Program Lingkungan Sehat Perumahan dan Permukiman sebesar Rp.13,298,297,500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 13,133.493.700,00 sisa sebesar Rp.164.803.800,00 atau tercapai sebesar 98,76%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Rekayasa dan Rancang Bangun Sarana dan Prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman

Anggaran pada Kegiatan Rekayasa dan Rancang Bangun Sarana dan Prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp. 26.677.800,00 dan terealisasi sebesar Rp. 23.634.390,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp. 3.043.410,00 atau tercapai sebesar 88,59%.

Output kegiatan ini adalah dokumen rekayasa dan rancang bangun sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman.

Outcome kegiatan ini adalah meningkatkan prosentase pemukiman yang tertata. Kegiatan ini tidak terlaksana dikarenakan ada *refocusing* pandemi *covid-19*.

b. Kegiatan Penyediaan Data Informasi Infrastruktur di Kawasan Permukiman

Anggaran pada Kegiatan Penyediaan Data informasi Infrastruktur di Kawasan Permukiman sebesar Rp. 228.663.100,00 dan terealisasi sebesar Rp. 219.554.690,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp. 9.108.410,00 atau tercapai sebesar 96,02%.

Output kegiatan ini adalah penyusunan data informasi kawasan permukiman di 22 Kecamatan di Wilayah Barat.

Outcome kegiatan ini adalah meningkatkan prosentase pemukiman yang tertata.

c. Kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk Perdesaan dan Perkotaan

Anggaran pada Kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp. 11.886.492.700,00 dan terealisasi sebesar Rp. 11.775.582.660,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp.110.910.040,00 atau tercapai sebesar 99,07%.

Output kegiatan ini adalah terpenuhinya infrastruktur perdesaan bersumber dana berasal dari APBD Propinsi sebanyak 53 paket pekerjaan dan 8 paket pekerjaan dari APBD Kabupaten, dan 3 (tiga) paket belanja

jasa konsultasi pengawasan. Luas penataan lingkungan permukiman penduduk perdesaan dari kegiatan ini adalah seluas 7,75 Ha dari 535,80 Ha (1,45%).

Outcome kegiatan ini adalah meningkatkan prosentase pemukiman yang tertata. Realisasi capaian kinerja hanya sebesar 1,45% dikarenakan ada *refocusing* pandemi covid-19.

d. Kegiatan Verifikasi dan Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan

Anggaran pada Kegiatan Verifikasi dan Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan sebesar Rp.1.156.463.900,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.114.721.960,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp. 41.741.940,00 atau tercapai sebesar 96,39%.

Output kegiatan ini adalah 7 lokasi PSU yg menjadi aset pemda dari target 15 lokasi (46,67%), 7 lokasi pembangunan PSU Perumahan yang sudah diserahterimakan dari target 5 lokasi (140%) dan luas permukiman yang didukung dengan PSU seluas 2,44 Ha dari target sebesar 1801 Ha (0,14%).

Outcome kegiatan ini adalah meningkatkan prosentase pemukiman yang tertata dan meningkatkan cakupan lingkungan yang sehat dan aman yg didukung dengan PSU.

3) Program Perencanaan Pengembangan Perumahan

Alokasi anggaran untuk Program Perencanaan Pengembangan Perumahan sebesar Rp.450,709,800,00 dan terealisasi sebesar Rp. 436,067,980,00 sisa sebesar Rp.14.641.820,00 atau tercapai sebesar 96.75%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Rekayasa dan Rancang Bangun Pengembangan Perumahan

Anggaran pada Kegiatan Rekayasa dan Rancang Bangun Pengembangan Perumahan sebesar Rp. 224.522.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 220.033.590,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp. 4.488.410,00 atau tercapai sebesar 98,00%.

Output kegiatan ini adalah 1 dokumen rekayasa dan rancang bangun sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman. *Outcome* kegiatan ini adalah

Outcome kegiatan ini adalah dapat meningkatkan prosentase perencanaan pembangunan perumahan yang sesuai dengan NSPK.

b. Kegiatan Penyediaan Data Informasi Perumahan

Anggaran pada Kegiatan Penyediaan Data Informasi Perumahan sebesar Rp. 226.187.800,00 dan terealisasi sebesar Rp. 216.034.390,00 sisa anggaran sebesar Rp. 10.153.410,00 atau realisasi mencapai 95,51%. *Output* kegiatan ini adalah 1 (satu) dokumen data informasi dan *updating* perumahan di 22 Kecamatan di Wilayah Barat.

Outcome kegiatan ini adalah dapat meningkatkan prosentase perencanaan pembangunan perumahan yang sesuai dengan NSPK.

4) Program Penataan Lingkungan Permukiman

Alokasi anggaran untuk Program Penataan Lingkungan Permukiman sebesar Rp.1.256.754.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.235.271.000,00 sisa sebesar Rp.21.483.000,00 atau tercapai sebesar 98,29%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Pengendalian Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

Anggaran Kegiatan Pengendalian Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) sebesar Rp. 1.199.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.178.017.000,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp. 21.483.000,00 atau tercapai sebesar 98,21%.

Output kegiatan ini adalah 3 (tiga) paket pekerjaan pembangunan infrastruktur perbaikan lingkungan permukiman di lokasi permukiman kumuh, 1 (satu) paket belanja jasa konsultansi pengawasan, 1 (satu) paket belanja konsultansi Penyusunan Naskah Akademis Raperda Cara Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh Perdesaan/Perkotaan, 1 (satu) paket belanja jasa konsultansi Review RP2KPKP, 1 (satu) paket belanja jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen UKL/UPL Kegiatan Penataan Skala Kawasan Kumuh Desa Ambulu. Luas Kegiatan Pengendalian Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) sebesar 7,75 Ha dari 3201,87 Ha (0,24%) dan penataan lingkungan permukiman penduduk perkotaan seluas 19,04 Ha dari 5,33 Ha (357,22%).

Outcome kegiatan ini adalah dapat menurunkan prosentase lingkungan pemukiman kumuh.

b. Kegiatan Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW)

Anggaran pada Kegiatan Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) sebesar Rp. 57.254.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 57.254.000,00 atau tercapai sebesar 100%.

Output kegiatan ini adalah rapat evaluasi dan 144 perjalanan dinas dalam daerah guna fasilitasi 4 (paket) pekerjaan perbaikan lingkungan permukiman perdesaan dan infrastruktur sosial ekonomi wilayah yang terbagi di 8 (delapan) lokasi kegiatan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW).

Outcome kegiatan ini adalah dapat menurunkan prosentase lingkungan permukiman kumuh.

b. Permasalahan dan Solusi

Dalam melaksanakan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menghadapi beberapa masalah sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan Kegiatan PISEW terkendala pandemi *Covid-19*
- b) Prioritas penentuan lokasi pekerjaan yang terkadang tidak di wilayah perbatasan desa dalam satu kecamatan penerima bantuan kegiatan PISEW tersebut
- c) Swadaya penerimaan bantuan
- d) Budaya menghitung hari dalam pelaksanaan pembangunan/ peningkatan kualitas rumah
- e) Cuaca yang tidak mendukung
- f) Pencairan anggaran yang terlambat
- g) Pemahaman /kesadaran penerima bantuan mengenai rumah layak huni
- h) Pemahaman/kesadaran pengembang tentang serah terima Perumahan
- i) PSU Perumahan kondisinya kurang layak
- j) Pengembang perumahan yang menelantarkan PSU perumahan dan tidak diketahui keberadaannya
- k) Pengembang yang bangkrut
- l) Pembangunan PSU yang tidak sesuai dengan siteplan

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi sebagaimana tersebut diatas, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan telah melakukan solusi-solusi sebagai berikut:

- a) Menerapkan protokol kesehatan
- b) Pembekalan atau sosialisasi kegiatan PISEW kepada Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang terbentuk agar mengutamakan pengembangan infrastruktur sosial ekonomi di wilayah perbatasan antar desa

- c) Sosialisasi pelaksanaan bantuan rutilahu dan penyerahan PSU perumahan yang kurang maksimal
- d) Meningkatkan koordinasi dengankementrian dan Propinsi
- e) Meningkatkan monitoring dan evaluasi /pendampingan
- f) Keterlambatan pembuatan Peraturan Bupati

c. Hal lain yang perlu untuk dilaporkan

Dalam melaksanakan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut yaitu adanya sosialisasi dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon kepada Badan Kerjasama antar Desa Penerima Kegiatan PISEW bila tidak ada.

3. Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pelaksanaan urusan ini dalam rangka pelaksanaan urusan wajib pemerintahan yang merupakan tugas dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Dalam rangka melaksanakan urusan ini, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan melaksanakan 3 (tiga) program dan 13 (tiga belas) kegiatan sebagaimana tercantum dalam Tabel 10.

**Tabel 10. Program dan Kegiatan
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Tahun Anggaran 2020**

No	Uraian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		15.648.839.800	15.138.322.919	96,74
Program Perencanaan, Pengembangan, Pembinaan Bangunan dan Gedung		1.983.017.100	1.819.708.660	91,76
1	Pembangunan/Peningkatan dan Rehabilitasi Bangunan dan Gedung	215.852.400	196.159.010	90,88
2	Kajian Teknis Bangunan Gedung pada Perumahan	431.987.500	389.574.500	90,18
3	Pengendalian dan Pengawasan Bangunan Gedung di Perumahan	137.701.400	117.030.580	84,99
4	Rekayasa dan Rancang Bangun Bangunan dan Gedung	971.198.200	903.306.380	93,01
5	Penyediaan Data Informasi Kepemilikan Bangunan dan Gedung	226.277.600	213.638.190	94,41
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum		8.488.940.200	8.152.764.289	96,04
1	Rekayasa dan Rancang Bangun Sarana dan Prasarana Air Minum	595.627.800	552.298.320	92,73
2	Penyediaan Data Informasi Sarana dan Prasarana Air Minum	21.932.100	19.238.320	87,72
3	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minumbagi Masyarakat	3.775.158.500	3.498.676.869	92,68
4	Penyediaan Sistem Distribusi Air Minum	4.096.221.800	4.082.550.780	99,67

No	Uraian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah Domestik		5.176.882.500	5.165.849.970	99,79
1	Rekayasa dan Rancang Bangun Air Limbah Domestik	72.982.100	72.083.690	98,77
2	Penyediaan Data Informasi Sarana dan Prasarana Air Limbah Domestik	73.741.900	72.579.490	98,42
3	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah Domestik	4.794.448.500	4.792.458.460	99,96
4	Penyediaan Air Limbah Domestik Berbasis Masyarakat	235.710.000	228.728.330	97,04

Rincian pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan ialah sebagai berikut:

1) Program Perencanaan, Pembangunan, Pembinaan Bangunan dan Gedung

Alokasi anggaran untuk Program Perencanaan, Pembangunan, Pembinaan Bangunan dan Gedung sebesar Rp. 1.983.017.100,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.819.708.660,00 sisa sebesar Rp. 163.308.440,00 atau tercapai sebesar 96.74 %. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Pembangunan/Peningkatan dan Rehabilitasi Bangunan dan Gedung

Anggaran pada Kegiatan Pembangunan/Peningkatan dan Rehabilitasi Bangunan dan Gedung sebesar Rp. 215.852.400,00 dan terealisasi sebesar Rp. 196.159.010,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp. 19.693.390,00 atau tercapai sebesar 90,88%.

Output kegiatan ini adalah Barang Jasa Pengadaan Kemanan Sarana Olah Raga (SOR) sehingga jumlah bangunan dan gedung 0 unit dikarenakan ada *refocusing* pandemi *covid-19*.

Outcame kegiatan ini adalah dapat meningkatkan prosentase bangunan dan gedung yang memiliki Sertifikat Laik Fungsi.

b. Kegiatan Kajian Teknis Bangunan Gedung pada Perumahan

Anggaran pada Kegiatan Kajian Teknis Bangunan Gedung pada Perumahan sebesar Rp. 431.987.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 389.574.500,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp. 42.413.000,00 atau tercapai sebesar 90,18%.

Output kegiatan ini adalah 42 Sertifikat Laik Fungsi, 18 *Site Plan*, 14 Revisi *Site Plan*, 32 *Layout*, dan 5 revisi *Layout*.

Outcome kegiatan ini adalah dapat meningkatkan prosentase bangunan dan gedung yang memiliki Sertifikat Laik Fungsi.

- c. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Bangunan Gedung di Perumahan

Anggaran pada Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Bangunan Gedung di Perumahan pada Perumahan sebesar Rp. 137.701.400,00 dan terealisasi sebesar Rp.117.030.580,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp. 20.670.820,00 atau tercapai sebesar 84,99%.

Output kegiatan ini adalah 2113 dokumen IMB dari 1000 dokumen IMB (211,3%).

Outcome kegiatan ini adalah dapat meningkatkan prosentase bangunan dan gedung yang memiliki Sertifikat Laik Fungsi.

- d. Kegiatan Rekayasa dan Rancang Bangun Bangunan dan Gedung

Anggaran pada Kegiatan Rekayasa dan Rancang Bangun Bangunan dan Gedung sebesar Rp. 971.198.200,00 dan terealisasi sebesar Rp. 903.306.380,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp. 67.891.820,00 atau tercapai sebesar 93,01%.

Output kegiatan ini adalah Dokumen Rekayasa Visual *Masterplan Islamic Center* dan Dokumen Rehabilitasi Gedung Kantor DPKPP Bidang Pertanahan dan Bangunan Gedung

Outcome kegiatan ini adalah dapat meningkatkan prosentase bangunan dan gedung yang memiliki Sertifikat Laik Fungsi.

- e. Kegiatan Penyediaan Data Informasi Kepemilikan Bangunan dan Gedung

Anggaran pada Kegiatan Penyediaan Data Informasi Kepemilikan Bangunan dan Gedung sebesar Rp. 226.277.600,00 dan terealisasi sebesar Rp. 213.638.190,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp. 12.639.410,00 atau tercapai sebesar 94,41%.

Output kegiatan ini adalah 1 (satu) dokumen data informasi kepemilikan bangunan gedung di 22 Kecamatan Wilayah Barat.

Outcome kegiatan ini adalah dapat meningkatkan prosentase bangunan dan gedung yang memiliki Sertifikat Laik Fungsi.

- 2) Program Perencanaan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum
Alokasi anggaran untuk Program Perencanaan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum sebesar Rp.8.488.940.200,00 dan terealisasi sebesar

Rp.8.152.764.289,00 sisa sebesar Rp.336.175.911,00 atau tercapai sebesar 96,04%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Rekayasa dan Rancang Bangun Sarana dan Prasarana Air Minum

Anggaran pada Kegiatan Rekayasa dan Rancang Bangun Sarana dan Prasarana Air Minum sebesar Rp. 595.627.800,00 dan terealisasi sebesar Rp. 552.298.320,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp. 43.329.480,00 atau tercapai sebesar 92,73%.

Output kegiatan ini adalah 1 (satu) dokumen rekayasa dan rancang bangun sarana dan prasarana air minum perkotaan dan perdesaan. *Outcome* kegiatan ini adalah meningkatkan cakupan jumlah sambungan rumah air minum.

b. Kegiatan Penyediaan Data Informasi Sarana dan Prasarana Air Minum

Anggaran pada Kegiatan Penyediaan Data Informasi Sarana dan Prasarana Air Minum sebesar Rp. 21.932.100,00 dan terealisasi sebesar Rp. 19.238.320,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp. 2.693.780,00 atau tercapai sebesar 87,72%. *Output* kegiatan ini adalah dokumen data informasi sarana dan prasarana air minum di 22 Kecamatan Wilayah Barat. *Outcome* kegiatan ini adalah meningkatkan cakupan jumlah sambungan rumah air minum. Kegiatan ini tidak terlaksana dikarenakan ada *refocusing* pandemi covid-19.

c. Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat

Anggaran pada Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat sebesar Rp. 3.775.158.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.498.676.869,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp. 276.481.631,00 atau tercapai sebesar 92,68%.

Output kegiatan adalah 1 (satu) paket Pengembangan Jaringan Perpipaan Perkotaan, Kecamatan Gempol, dan 1 (satu) paket Pengembangan Jaringan Perpipaan Perdesaan, Desa Wargabinangun Kecamatan Kaliwedi yaitu 30 sambungan rumah yang bersumber dari DAK Penugasan serta 2 (dua) paket belanja jasa konsultasi pengawasan dan 4 (empat) paket dari Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) yang bersumber dari anggaran APBN sebanyak 242 sambungan rumah yang terlayani air minum.

Outcome kegiatan ini adalah meningkatkan cakupan jumlah sambungan rumah air minum.

d. Kegiatan Penyediaan Sistem Distribusi Air Minum

Anggaran pada Kegiatan Penyediaan Sistem Distribusi Air Minum sebesar Rp. 4.096.221.800,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.082.550.780,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp. 13.671.020,00 atau tercapai sebesar 99,67%.

Output kegiatan ini adalah 19 paket pekerjaan Penyediaan Sistem Distribusi Air Minum yaitu 1435 Sambungan Rumah (SR) air minum dari target sebesar 11300 SR (12,70%) dan 2 (dua) paket belanja jasa Konsultasi pengawasan.

Outcome kegiatan ini adalah meningkatkan cakupan jumlah sambungan rumah air minum. Realisasi capaian kinerja hanya sebesar 12,70% dikarenakan ada *refocusing* pandemi *covid-19*.

3) Program Perencanaan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah Domestik

Alokasi anggaran untuk Program Perencanaan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah Domestik sebesar Rp.5.176.882.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.5.165.849.970,00 sisa sebesar Rp. 11.032.530,00 atau tercapai sebesar 99,79%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Rekayasa dan Rancang Bangun Air Limbah Domestik

Anggaran pada Kegiatan Rekayasa dan Rancang Bangun Air Limbah Domestik sebesar Rp. 72.982.100,00 dan terealisasi sebesar Rp.72.083.690,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp. 898.410,00 atau tercapai sebesar 98,77%.

Output kegiatan ini adalah 1 dokumen perencanaan sarana dan prasarana air limbah domestik.

Outcome kegiatan ini adalah dapat meningkatkan cakupan jumlah sambungan rumah air minum.

b. Kegiatan Penyediaan Data Informasi Sarana dan Prasarana Air Limbah Domestik

Anggaran pada Kegiatan Penyediaan Data Informasi Sarana dan Prasarana Air Limbah Domestik sebesar Rp. 73.741.900,00 dan terealisasi sebesar Rp. 72.579.490,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp. 1.162.410,00 atau tercapai sebesar 98,42%.

Output kegiatan ini adalah 1 dokumen data informasi sarana dan prasarana air limbah domestik di 22 Kecamatan Wilayah Barat, Kecamatan Gunungjati

Outcome kegiatan ini adalah dapat meningkatkan cakupan jumlah sambungan rumah air minum.

c. Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah Domestik

Anggaran pada Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah Domestik sebesar Rp. 4.794.448.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.792.458.460,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp. 1.990.040,00 atau tercapai sebesar 99,96%.

Output kegiatan ini adalah tersedianya prasarana dan sarana air limbah domestik di 8 lokasi.

Outcome kegiatan ini adalah dapat meningkatkan cakupan jumlah sambungan rumah air minum.

d. Kegiatan Penyediaan Air Limbah Domestik Berbasis Masyarakat

Anggaran pada Kegiatan Penyediaan Air Limbah Domestik Berbasis Masyarakat sebesar Rp. 235.710.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 228.728.330,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp. 6.981.670,00 atau tercapai sebesar 97,04%.

Output kegiatan ini adalah honor fasilitator selama 3 (tiga) bulan, 1 (satu) kegiatan sosialisasi Penyediaan Air Limbah Domestik/ Sanitasi, dan 30 kali perjalanan dalam daerah. Kegiatan ini menyediakan 460 Sambungan Rumah (SR) air limbah domestik dari target sebesar 7500 SR (6,13%).

Outcome kegiatan ini adalah dapat meningkatkan cakupan jumlah sambungan rumah air minum dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sanitasi. Realisasi capaian kinerja hanya sebesar 6,13% dikarenakan ada *refocusing* pandemi covid-19.

b. Permasalahan dan Solusi

Dalam melaksanakan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menghadapi beberapa masalah sebagai berikut:

- a) Dikarenakan adanya *refocusing* anggaran, maka masuknya anggaran yang bersumber dari DAK untuk kegiatan Penyediaan Air Minum mendekati akhir tahun anggaran
- b) Masih banyaknya rumah yang belum terlayani air limbah yaitu belum tertangani dalam memiliki jamban berikut septictank akibat keterbatasan anggaran yang disalurkan kepada KSM penerima bantuan Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah Domestik
- c) Terbatas nya sumber daya manusia (personil) dan sarana pendukung untuk monitoring terhadap bangunan gedung dan prasarana umum. Sehingga mengakibatkan kurang optimalnya monitoring dan

pengawasan terhadap bangunan, baik bangunan gedung dan prasarana lainnya yang belum ber IMB maupun yang sudah ber IMB, upaya tindak memanfaatkan dan mengefektifkan sumber daya manusia dan sarana pendukung yang ada untuk melakukan pengawasan terhadap bangunan gedung dan prasarana lainnya.

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi sebagaimana tersebut diatas, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan telah melakukan solusi-solusi sebagai berikut:

- a) Percepatan pelaksanaan pekerjaan fisik
- b) Meningkatkan kesadaran masyarakat agar memiliki jamban dan septictank yang memenuhi syarat teknis secara mandiri.
- c. Hal lain yang perlu untuk dilaporkan

Dalam melaksanakan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut yaitu penambahan anggaran untuk pengembangan jaringan distribusi air minum dan pemasangan sambungan rumah dan penyediaan sarana dan prasarana air limbah bagi masyarakat.

4. Urusan Wajib Bidang Pertanahan

a. Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pelaksanaan urusan ini dalam rangka pelaksanaan urusan wajib pemerintahan yang merupakan tugas dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Dalam rangka melaksanakan urusan ini, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan melaksanakan 2 (dua) program dan 3 (tiga) kegiatan sebagaimana tercantum dalam Tabel 11 berikut.

**Tabel 11. Program dan Kegiatan Urusan Pertanahan
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Tahun Anggaran 2020**

No	Uraian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
BIDANG PERTANAHAN		324.426.700	230.428.160	71,03
Program PenataanPenguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah		274.426.700	212.648.160	77,49
1	PenataanPenguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	199.426.700	138.697.380	69,55
2	Inventarisasi dan Penatagunaan Tanah	75.000.000	73.950.780	98,60
Program Inventarisasi dan Penatagunaan Tanah		50.000.000	17.780.000	35,56
1	FasilitasiPenyelesaianKonflik- konflik Pertanahan	50.000.000	17.780.000	35,56

Alokasi anggaran untuk Bidang Pertanahan Sebesar Rp.324.426.700,00 dan terealisasi sebesar Rp.230.428.160,00 sisa sebesar Rp. 93.998.540,00 atau tercapai sebesar 71,03% Rincian pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan ialah sebagai berikut:

1) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Alokasi anggaran untuk Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah sebesar Rp. 274.426.700,00 dan terealisasi sebesar Rp. 212.648.160,00 sisa sebesar Rp. 961.778.540,00 atau tercapai sebesar 77,49%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Anggaran pada Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah sebesar Rp. 199.426.700,00 dan terealisasi sebesar Rp. 138.697.380,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp. 60.729.320,00 atau tercapai sebesar 69,55%.

Output kegiatan ini adalah jumlah penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Outcame kegiatan ini adalah dapat meningkatkan prosentase kepemilikan tanah pemerintah daerah tertata dengan baik. Realisasi kegiatan ini adalah terlaksananya 51 buah Program Sertifikat Daerah (Proda) di Desa Sampiran dari target sebesar 51 buah Proda.

b. Kegiatan Inventarisasi dan Penatagunaan Tanah

Anggaran pada Kegiatan Penyediaan Data Informasi Kepemilikan Bangunan dan Gedung sebesar Rp. 75.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 73.950.780,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp. 1.049.220,00 atau tercapai sebesar 98,60%.

Output kegiatan ini adalah 977 dokumen Izin Lokasi dan 8 dokumen Penetapan Lokasi dari target sebesar 400 dokumen (246,25%). Selain itu, *output* kegiatan ini adalah database pertanahan untuk 1 Kecamatan (9 Desa) dari target sebesar 7 Kecamatan (14,29%).

Outcame kegiatan ini adalah dapat meningkatkan prosentase kepemilikan tanah pemerintah daerah tertata dengan baik.

2) Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

Anggaran pada Program Inventarisasi dan Penatagunaan Tanah yang dilaksanakan Bidang Pertanahan melalui kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.50.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 17.780.000,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp. 32.220.000,- atau tercapai sebesar 35,56%.

Output kegiatan ini adalah 1 buah konflik pertanahan yang terfasilitasi dari target 5 buah konflik pertanahan.

Outcome kegiatan ini adalah dapat meningkatkan prosentase kepemilikan tanah pemerintah daerah tertata dengan baik.

b. Permasalahan dan Solusi

Dalam melaksanakan Urusan Pertanahan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menghadapi beberapa masalah sebagai berikut:

- a) Tidak ada /belum ada peta batas Administrasi antar desa pada saat pendataan tanah timbul
- b) Tidak ada peta rincian desa, sehingga tidak ada acuan dalam pendataan dan pengukuran bidang tanah di kegiatan sertifikasi daerah, serta penyelesaian konflik pertanahan
- c) Penggarapan Tanah timbul belum diatur dalam peraturan

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi sebagaimana tersebut diatas, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan telah melakukan solusi-solusi sebagai berikut:

- a) Perlu adanya kegiatan pemetaan batas desa dengan diadakannya MOU antar bidang pertanahan DPKPP dan kantor pertanahan Kab. Cirebon
- b) Perlu adanya kegoatan generalisasi peta rincian desa berupa peta digital yang disiapkan dalam bentuk *softfile*
- c) Perlu dibuat regulasi untuk tanah timbul, agar lebih teratur dan sesuai dengan tata ruang serta tidak mengalami terhadap sempadan sungai

c. Hal lain yang perlu untuk dilaporkan

Dalam melaksanakan Urusan Pertanahan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut perlu adanya peraturan untuk mengatur tanah timbul.

5. Prestasi-prestasi

Tidak ada

E. PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1. Jenis Pelayanan Dasar

Pelayanan dasar yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Cirebon pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang ialah sebagai berikut:

a. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari

Dengan indikator pencapaian jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari.

b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

Dengan indikator pencapaian jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

2. Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Target dan realisasi pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dijelaskan pada Tabel 12.

Tabel 12. Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET (%)	CAPAIAN (%)
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100	65,07
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100	74,86

3. Alokasi Anggaran Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang tentu saja membutuhkan anggaran untuk pelaksanaannya. Tabel 12 menggambarkan rincian anggaran yang dialokasikan untuk mencapai standar pelayanan minimal urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.

**Tabel 13. Anggaran untuk Mencapai SPM
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

No	Sumber Dana / SKPD	Anggaran (Rp)		Total
		Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	
	APBD Kabupaten Cirebon			
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
2	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	8.208.572.000	33.960.067.300	42.168.639.300
TOTAL		8.208.572.000	33.960.067.300	42.168.639.300

4. Dukungan Personil Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentu saja membutuhkan dukungan personil untuk pelaksanaannya. Berikut merupakan rincian dukungan personil untuk mencapai standar pelayanan minimal urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.

**Tabel 14. Dukungan Personil untuk Mencapai SPM
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

No	SKPD	Jumlah PNS	Jumlah Fungsional	Jumlah Struktural	Jumlah Non Struktural
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
2	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	21	0	6	15
TOTAL		21	0	6	15

5. Permasalahan dan Solusi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai SPM:

1. Penerapan target pada masing-masing SPM untuk Penyediaan Air Minum dan Penyediaan Sanitasi tidak diimbangi dengan alokasi anggaran yang sesuai, sehingga pencapaian SPM tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan dalam tahun berjalan
2. Adanya refofusing anggaran untuk penanganan covid-19, dengan mengambil dari anggaran Program Kegiatan pendukung SPM Penyediaan Air Minum dan Sanitasi, sehingga berdampak pada pencapaian target yang telah ditentukan

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah:

1. Alokasi anggaran pada program Kegiatan untuk pencapaian SPM Penyediaan Air Minum dan Sanitasi disesuaikan dengan target yang akan dicapai dalam setiap tahunnya
2. Komitmen Pemerintah Daerah untuk pencapaian SPM Penyediaan Air Minum dan Sanitasi

URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1. Jenis Pelayanan Dasar

Pelayanan dasar yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Cirebon pada urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ialah sebagai berikut:

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten Cirebon
Dengan indikator pencapaian jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni.
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon
Dengan indikator pencapaian jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.

2. Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Target dan realisasi pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dijelaskan pada Tabel 15.

Tabel 15. Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET (%)	CAPAIAN (%)
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kabupaten	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	0
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100	0

3. Alokasi Anggaran Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tentu saja membutuhkan anggaran untuk pelaksanaannya. Rincian anggaran yang dialokasikan untuk mencapai standar pelayanan minimal urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dijelaskan pada Tabel 16.

Tabel 16. Anggaran untuk Mencapai SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Sumber Dana / SKPD	Anggaran (Rp)		Total
		Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	
APBD Kabupaten Cirebon				
1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	8.208.572.000	33.960.067.300	42.168.639.300
TOTAL		8.208.572.000	33.960.067.300	42.168.639.300

4. Dukungan Personil Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tentu saja membutuhkan dukungan personil untuk pelaksanaannya. Dukungan personil untuk mencapai standar pelayanan minimal urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dijelaskan pada Tabel 17.

Tabel 17. Dukungan Personil untuk Mencapai SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	SKPD	Jml PNS	Jml Fungsional	Jml Struktural	Jml Non Struktural
1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	25	0	8	17
TOTAL		25	0	8	17

5. Permasalahan dan Solusi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai SPM:

1. Pelaksanaan SPM untuk perumahan rakyat belum dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, karena masih menggunakan nomenklatur yang lama.
2. Kegiatan yang dilakukan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan hanya pada penyediaan rumah layak huni saja, baik di kawasan permukiman dan diluar kawasan permukiman kumuh kabupaten

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah:

1. Penyesuaian program kegiatan dengan SPM yang sudah ditetapkan dengan calon penerima adalah korban bencana di kab/kota

F. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ TAHUN 2019

Berdasarkan hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Cirebon Tahun 2019, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon telah memberikan rekomendasi sebagai berikut.

1. Membuat SOP pengadaan tanah yang bisa dipahami oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah.
2. Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Cirebon harus sudah memiliki Lokasi Lahan Tempat Pengelolaan Sampah Akhir (TPA) yang permanen.
3. Diperlukan komitmen Bupati Cirebon untuk selesaikan persoalan pengadaan lahan TPA di Kabupaten Cirebon.
4. Diperlukan penambahan titik sumber air bersih di wilayah Kabupaten Cirebon, penambahan sumber anggaran penanganan rumah tidak layak huni dan membuat terobosan regulasi mengenai pengelolaan prasarana sarana dan utilitas perumahan dengan *developer*.

Sehubungan dengan rekomendasi tersebut, Bupati Cirebon telah menindaklanjuti rekomendasi dimaksud melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. SOP Pengadaan Tanah skala kecil dan skala besar sudah dibuat dan sudah tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
2. Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Cirebon sudah merencanakan pengadaan tanah untuk Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) di 2 (dua) lokasi yaitu di Desa Kepuh Kecamatan Palimanan dan Desa Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng. Pengadaan tanah tersebut sudah terbentuk Tim Pelaksana

Pengadaan Tanah untuk Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) dengan Surat Keputusan (SK) Bupati

3. Pemerintah Daerah melalui Bupati Cirebon telah menyepakati dengan FORKOPIMDA untuk rencana pelaksanaan Pengadaan Tanah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) di Kabupaten Cirebon.
4. Untuk penambahan titik sumber air bersih di wilayah Kabupaten Cirebon pada tahun 2020 tidak dapat berjalan maksimal dikarenakan adanya realokasi anggaran untuk penanganan pandemi *covid-19*, baik itu yang bersumber dari anggaran APBD II dan DAK. Adapun Kegiatan Sistem Penyediaan Air Minum yang dilaksanakan di Tahun Anggaran 2020 yaitu 4 (empat) Paket kegiatan PAMSIMAS yang bersumber dari APBN yang berlokasi di Desa Dukuhwidara, Kecamatan Pabedilan, Desa Kalibuntu Kecamatan Pabedilan, Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang, Desa Setupatok Kecamatan Mundu dijelaskan pada Tabel 18.

Tabel 18. Daftar Nama Desa Penerima Program Pamsimas Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2020

Desa	Kecamatan	Tahun	Jumlah Penduduk		Akses Air Minum					
			KK	Jiwa	Existing		Pamsimas			
					KK	Jiwa	KK	Jiwa	SR	
									Dgn Meter Air	Tanpa Meter Air
DUKUHWIDARA	PABEDILAN	2020	2.007	6.585	863	2.831	110	405	98	0
GEBANG ILIR	GEBANG	2020	1.928	6.119	674	5.100	6	21	4	0
KALIBUNTU	PABEDILAN	2020	1.602	5.002	577	1.154	25	78	20	0
SETUPATOK	MUNDU	2020	3.741	11.198	1.787	6.742	182	711	120	0

Sementara itu, pelaksanaan kegiatan penanganan rutilahu dengan menggunakan anggaran APBD II pada tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan, karena realokasi anggaran untuk penanganan pandemi *covid-19*. Tapi yang bersumber dana dari APBN dan APBD I tetap dapat dilaksanakan, dengan jumlah 970 penerima bantuan dari sumber dana APBN dapat dilihat di Tabel 19 dan 360 penerima bantuan dari sumber dana APBD I dapat dilihat di Tabel 20.

**Tabel 19. Daftar Nama Desa Penerima Bantuan Program BSPS
Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2020**

NO.	KECAMATAN	DESA	JUMLAH UNIT
1	ARJAWINANGUN	JUNGJANG WETAN	15
2		TEGALGUBUG	15
3		TEGALGUBUG LOR	15
4	CIWARINGIN	GINTUNG KIDUL	15
5		GINTUNG TENGAH	20
6		GALAGAMBA	17
7	GEMPOL	WINONG	18
8	PLERED	SARABAU	15
9		TRUSMI WETAN	19
10	GUNUNGJATI	BABADAN	15
11		MAYUNG	15
12		SAMBENG	15
13	GREGED	GUMULUNG LEBAK	21
14		GUMULUNG TONGGOH	20
15	PABUARAN	PABUARAN LOR	15
16	CILEDUG	JATISEENG	25
17	PABEDILAN	BABAKAN LOSARI	20
18	LOSARI	KALISARI	20
19	TENGAH TANI	DAWUAN	25
20	KARANG SEMBUNG	KALIMEANG	50
21		KARANGMALANG	50
22		KARANGSUWUNG	30
23		KUBANGKARANG	30
24	KARANGWARENG	BLENDER	20
25		JATIPIRING	30
26		KARANGANYAR	30
27		KARANGASEM	40
28		KARANGWARENG	70
29		SUMURKONDANG	60
30	LEMAHABANG	WANGKELANG	30
31	LOSARI	BARISAN	40
32	PENGENAN	PANGENAN	20
33	WALED	KARANGSARI	50
34		MEKARSARI	50
35		WALDKOTA	30
TOTAL			970

Tabel 20. Daftar Nama Desa Penerima Bantuan Program Perbaikan Rutilahu Sumber Dana APBD I Tahun Anggaran 2020

NO.	KECAMATAN	DESA	JUMLAH UNIT
1	PLUMBON	DANAMULYA	40
2	SUMBER	KEMANTREN	20
3		TUKMUDAL	20
4		BABAKAN	40
5		PERBUTULAN	20
6		MATANGAJI	20
7		SIDAWANGI	20
8		WATUBELAH	40
9		GEGUNUNG	20
10		KENANGA	20
11		KALIWADAS	40
12		PEJAMBON	40
13	GUNUNGJATI	ASTANA	20
TOTAL			360

Permasalahan regulasi penyerahan PSU perumahan dari pengembang kepada pemerintah daerah sedang tahap penyelesaian *draft* menunggu persetujuan akhir dari beberapa dinas/instansi teknis terkait.

Solusi untuk permasalahan air bersih dan penanganan rutilahu adalah sebagai berikut:

- Untuk kegiatan penambahan titik sumber air dan penanganan rumah tidak layak huni, telah dialokasikan kembali untuk pelaksanaan tahun 2021 yang disesuaikan dengan pagu anggaran;
- Untuk kegiatan yang direkomendasikan tersebut yaitu penambahan titik sumber air dan penanganan rumah tidak layak huni agar tidak termasuk kegiatan yang terrealokasi anggaran;
- Percepatan penetapan Peraturan Bupati tentang penyerahan aset PSU perumahan dari pengembang kepada pemerintah daerah.

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cirebon adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Undang–Undang RI 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 69 ayat (1). Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2020 merupakan laporan pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2020 dengan mengacu pada kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, pelaksanaan asas desentralisasi, pengelolaan keuangan, serta tugas umum pemerintahan.

Dari hasil kinerja yang dilaporkan pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cirebon, dapat disimpulkan bahwa dalam pembangunan yang telah dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan, pada umumnya dinilai berjalan dengan baik dan lancar di masa pandemi *covid-19*. Hasil pembangunan yang telah dicapai pada tahun 2020 tentunya masih perlu untuk ditingkatkan kembali agar apa yang menjadi target dan sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 dapat dicapai dan dilaksanakan.

Terhadap berbagai kekurangan, kelemahan dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2020 akan dilakukan evaluasi untuk dapat dijadikan acuan bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Bupati Cirebon Tahun 2020 ini dapat dijadikan bahan evaluasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan memberikan rekomendasi serta catatan-catatan untuk penyempurnaan dan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Cirebon, sehingga dapat mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang lebih sejahtera.

Sumber, Februari 2021
KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN

H. SUKMA NUGRAHA SH., MM
NIP. 19590215 198503 1 011